

## BAB II

### DINAMIKA KRISIS PANGAN DI VENEZUELA

Bab kedua dalam penelitian ini akan membedah mengenai dinamika krisis pangan di Venezuela. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kondisi umum krisis pangan di Venezuela, faktor-faktor terjadinya krisis pangan di Venezuela meliputi dinamika politik di Venezuela pada tahun 2020-2022 dan pengaruh Covid-19 terhadap krisis pangan di Venezuela. Serta, dalam bab ini penulis akan menjelaskan profil *World Food Programme* secara global dan di Venezuela.

#### 2.1 Gambaran Umum Krisis Pangan di Venezuela

Tantangan dalam berkurangnya pasokan makanan dalam suatu negara membawa dampak bagi meningkatnya tingkat kelaparan bagi masyarakat. Permasalahan akan ketahanan pangan tersebut menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat dimana hal tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan pada negara tersebut. Permasalahan akan ketahanan pangan biasanya erat kaitannya dengan perubahan iklim, kondisi ekonomi dan dinamika politik di dalam negara tersebut. Hak atas pangan sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak atas pangan tersebut pertama kali disepakati dalam KTT Milenium pada tahun 2000 yang menyepakati 8 tujuan pembangunan global atau disebut dengan *Millenium Development Goals (MDGs)*.<sup>33</sup> Tujuan-tujuan MDGs meliputi berbagai aspek

---

<sup>33</sup> World Health Organizations, "Millennium Development Goals (MDGs)," last modified 2018, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-%28mdgs%29>.

dalam kehidupan seperti memberantas kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar, mendorong kesetaraan gender dan lain-lain. Kemudian, konsep dari MDGs tersebut berakhir pada tahun 2015 lalu digantikan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang aktif mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Perbedaan MDGs dan SDGs terletak pada target yang lebih luas dan universal dimana SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang spesifik dan mencakup diberbagai aspek pembangunan global salah satunya yaitu menghapuskan kemiskinan, kelaparan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.<sup>34</sup> Konsep MDGs dan SDGs menekankan bahwa setiap ada penurunan dalam salah satu kategori seperti ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan ataupun politik dapat diantisipasi dengan melalui indikator, melibatkan kerja sama dengan organisasi maupun perusahaan multinasional dalam mencegah dan menyelesaikan isu-isu terkait. Salah satu perusahaan multinasionalnya adalah EIU (*Economist Intelligence Unit*) salah satu cabang *The Economist Group* yang memberikan rekomendasi maupun prakiraan melalui penelitian dan analisis. Salah satu hasil analisisnya yaitu *Global Food Security Index* yang mengukur keamanan pangan di 113 negara berdasarkan beberapa kategori seperti *affordability* (keterjangkauan), *availability* (ketersediaan), *quality* (kualitas), *security* (keamanan), *sustainability* (keberlanjutan) dan *adaptation* (adaptasi).<sup>35</sup> Adapun organisasi internasional seperti FAO yang mengukur tingkat kekurangan gizi serta

---

<sup>34</sup> “About | Department of Economic and Social Affairs,” accessed March 13, 2024, <https://sdgs.un.org/about>.

<sup>35</sup> A Thomas and D B Hombres, *The Use of the Global Food Security Index to Inform the Situation in Food Insecure Countries*, *International Journal of Surgery*, vol. 78, 2017. <DOI: 20.500.12592/3jzsgp.>

tingkat ketidakamanan pangan serta ada *World Food Programme* yang menggunakan *Consolidated Approach to Reporting Food Security Indicators* (CARI) untuk melakukan survey dalam menentukan ketidakamanan pangan sebuah negara.<sup>36</sup>

Venezuela merupakan salah satu negara yang terdampak krisis pangan. Pada tahun 2015 *Joint Research Centre* komisi Eropa bersama dengan FAO dan WFP membuat laporan krisis pangan global yang bernama *Global Report on Food Crises* (GRFC) yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017.<sup>37</sup> Pada tahun 2017, GRFC hendak memasukkan Venezuela ke dalam salah satu negara yang terdampak krisis pangan namun, GRFC mengalami kesulitan karena kurangnya data dan pemerintah Venezuela yang secara ketat menolak organisasi internasional untuk melakukan survey di negara nya. Pada bulan April 2020, Venezuela diikutsertakan dalam *Global Report on Food Crises* (GRFC) dan ditempatkan sebagai negara keempat terbesar dengan 9.3 juta orang mengalami ketidakamanan pangan akut atau setara dengan 32% dari populasi berada dalam tingkat krisis atau lebih tinggi dan dinobatkan sebagai salah satu negara yang masuk dalam IPC/CH (*Integrated Food Security Phase Classification/Cadre Harmonise*) Fase 3 atau lebih tinggi yang menunjukkan situasi krisis pangan yang cukup tinggi dan 17 juta orang masuk ke

---

<sup>36</sup> World Food Programme, "WFP Venezuela Food Security Assessment Main Findings," last modified 2020, <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuela-food-security-assessment-main-findings-data>.

<sup>37</sup> FSIN, "Global Report on Food Crises 2017," *Food Security Information Network* (2017). <[https://www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/newsroom/docs/20170328\\_Full%20Report\\_Global%20Report%20on%20Food%20Crises\\_v1.pdf](https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/20170328_Full%20Report_Global%20Report%20on%20Food%20Crises_v1.pdf)>

dalam IPC/CH Fase 2 menyatakan bahwa 92% populasi Venezuela mengalami ketidakamanan pangan.<sup>38</sup>

Menurut *Global Food Security Index* pada tahun 2020 Venezuela merupakan salah satu negara yang memiliki skor keamanan kesehatan terendah di wilayah Amerika Latin dan termasuk ke dalam 20 negara terbawah di dunia.<sup>39</sup> Hal tersebut mengakibatkan Venezuela masuk ke dalam salah satu negara yang berisiko tinggi untuk sakit dan meninggal. Tingginya angka kekurangan gizi membawa risiko tambahan pada negara tersebut. Adanya ketidakstabilan politik, krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 yang secara bersamaan memicu meningkatnya potensi krisis pangan dan insekuritas ketahanan pangan secara berkepanjangan di Venezuela yang berkaitan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Venezuela.

**Tabel 2. 1 Nilai Tingkat Ketahanan Pangan Venezuela<sup>40</sup>**

| <b>Nilai Tingkat Ketahanan Pangan Venezuela</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Tahun</b>                                    | <b>Nilai</b> |
| 2020  | 42.8         |
| 2021  | 39.4         |
| 2022  | 42.6         |

Sumber: *Global Food Security Index 2020-2022*

Pada tabel 2.1 terlihat kondisi ketahanan pangan Venezuela pada rentang waktu 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan tantangan yang signifikan. Sebagaimana tercermin dalam *Global Food Security Index* (GFSI). Pada tahun

<sup>38</sup> FSIN, "Global Report on Food Crises 2020," *Food Security Information Network*, no. September (2019): 1–202. < <https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2020>>

<sup>39</sup> Global Food Security Index, "Global Food Security Index 2020," *The Economist Intelligence Unit Limited 2020* (2020): 1–52. < <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/resource-library>>

<sup>40</sup> Ibid.

2020, skor Venezuela mencapai 42.8 dari 100, mencerminkan tingkat keamanan pangan yang rendah.<sup>41</sup> Kondisi keamanan pangan pun semakin memburuk pada tahun 2021 dengan penurunan skor menjadi 39.4 dan pada tahun 2022 tingkat keamanan pangan kembali naik di skor 42.6.<sup>42</sup> Meskipun terjadi peningkatan keamanan pangan pada tahun 2022 namun, tingkat keamanan pangan di Venezuela tetap rendah bahkan terendah di Amerika Latin.<sup>43</sup> Hal ini juga didukung dengan laporan tahunan World Bank yang menyatakan tingkat inflasi pangan di Venezuela pada tahun 2022 yang menunjukkan tingkat inflasi yang tinggi sebesar 414%.<sup>44</sup> Dengan inflasi pangan yang tinggi tersebut menciptakan sebuah kondisi yang sulit bagi masyarakat. Dampak langsungnya ialah berkurangnya daya beli masyarakat karena naiknya harga kebutuhan pokok. Hal tersebut mengakibatkan makanan menjadi semakin sulit untuk didapatkan dimana pendapatan masyarakat Venezuela tidak sejalan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tinggi.<sup>45</sup> Situasi seperti ini membuat masyarakat Venezuela dihadapkan dengan pilihan yang sulit antara memenuhi kebutuhan dasar ataupun mengalokasikan pendapatannya untuk kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut juga mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan di negara tersebut tercatat sebanyak

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Global Food Security Index, "Global Food Security Index 2021," *The Global Food Security Index (GFSI) is the preeminent source of intelligence on the drivers of global food security. Developed by Economist Impact and supported by Corteva Agriscience, it evaluates food security in 113 countries across four key pillars:* (2021): 47. <https://nonews.co/wp-content/uploads/2022/03/GFSI2021.pdf>

<sup>43</sup> Global Food Security Index, "Global Food Security Index 2022," *The Economist Intelligence Unit* (2022): 1–42. <[https://my.corteva.com/GFSI?file=GFSI\\_2022\\_Global\\_Report\\_Sep\\_2022](https://my.corteva.com/GFSI?file=GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022)>

<sup>44</sup> World Bank, "Global Market Outlook: Trends in Global Agricultural Commodity Prices Food Price Inflation Dashboard (Update March 23, 2023)." <<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/food-security-update>>

<sup>45</sup> "Extreme Poverty in Venezuela Rises to 76.6% - Study | Reuters," accessed March 14, 2024, <https://www.reuters.com/world/americas/extreme-poverty-venezuela-rises-766-study-2021-09-29/>.

28 juta penduduk negara tersebut atau sekitar 76,6% penduduk hidup dalam kemiskinan ekstrem.<sup>46</sup>

**Tabel 2. 2 Kondisi Gizi Masyarakat Venezuela<sup>47</sup>**

| Tahun     | Jumlah Orang Yang Kekurangan Gizi (Juta) | Tingkat Kekurangan Gizi (%) | Kecukupan Rata-Rata Pasokan Pangan (%) |
|-----------|--|-----------------------------|--|
| 2012-2014 | 0.7                                      | 2.5                         | 120                                    |
| 2013-2015 | 1.3                                      | 4.5                         | 117                                    |
| 2014-2016 | 3.4                                      | 11.3                        | 109                                    |
| 2015-2017 | 4.9                                      | 16.4                        | 103                                    |
| 2016-2018 | 6.5                                      | 22.2                        | 97                                     |
| 2017-2019 | 6.6                                      | 22.7                        | 97                                     |
| 2018-2020 | 7.1                                      | 24.9                        | 96                                     |
| 2019-2021 | 6.5                                      | 22.9                        | 97                                     |
| 2020-2022 | 5.1                                      | 17.9                        | 100                                    |
| 2021-2023 | 5  | 17.9                        | 99                                     |

Sumber: FAOSTAT

Dari tabel 2.2 tersebut terlihat adanya fluktuasi kondisi krisis pangan yang terjadi di Venezuela dimana jumlah orang yang kekurangan gizi dan tingkat kekurangan menggambarkan tentang bagaimana kondisi gizi masyarakat dan sejauh mana tingkat keparahan masalah gizi yang ada pada masyarakat. Sedangkan,

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> FAOSTAT, "Suite of Food Security Indicators - Venezuela," accessed November 3, 2024, <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>.

kecukupan rata-rata pasokan pangan mencerminkan ketersediaan pangan secara keseluruhan dalam suatu wilayah. Berdasarkan tabel tersebut situasi krisis pangan di Venezuela menunjukkan tren yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah orang yang mengalami kekurangan gizi meningkat secara signifikan mencapai puncaknya pada periode 2018-2020 dengan 7.1 Juta orang sementara tingkat kekurangan gizi naik hingga 24.9%, Tingkat kecukupan rata-rata pasokan pangan juga mengalami penurunan yang tajam dari 120% pada tahun 2012-2014 menjadi 96% pada tahun 2018-2020. Meskipun terjadi sedikit pemulihan kondisi pada periode 2020-2022, tantangan krisis pangan tetap besar dengan 5.1 juta orang yang masih mengalami kekurangan gizi. Peningkatan jumlah orang yang kekurangan gizi dari 0.7 juta pada tahun 2012-2014 menjadi 5.1 juta pada tahun 2020-2022 menunjukkan eskalasi masalah kesehatan dan nutrisi yang ada dalam masyarakat. Tingkat kekurangan gizi yang terus meningkat dari 2.5% menjadi 17.9% pada periode yang sama mencerminkan besarnya dampak krisis pangan di Venezuela. Disisi lain, dalam laporan UN News April 2021 menyatakan bahwa sekitar 8 juta anak di bawah usia 14 tahun mengalami kekurangan gizi di Venezuela dan setidaknya satu dari tiga warga Venezuela yaitu sekitar 32.3% mengalami kerawanan pangan yang berdampak bagi seluruh populasi di negara Venezuela.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> “World Food Programme Reaches Deal to Supply Food to 185,000 Children in Venezuela | UN News,” accessed March 13, 2024, <https://news.un.org/en/story/2021/04/1090162>.

**Gambar 2. 1 Seorang Anak Yang Sedang Menjalani Tes Gizi Buruk di  
Asociation Civil Oportunidad<sup>49</sup>**



Sumber: Jana Cavojska/*The New Humanitarian*

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus gizi buruk di Venezuela. Salah satu paling parah adalah di daerah Caracas. Caracas menghadapi banyak kasus gizi buruk khususnya pada anak-anak di bawah dua tahun yang menderita kondisi malnutrisi akut yang mengakibatkan mereka mengidap kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor sendiri merupakan salah satu malnutrisi paling parah yang ditandai dengan pembekakan di bawah kulit dan marasmus

---

<sup>49</sup> Jana Cavojska, "A Child Being Tested for Malnutrition in Asociación Civil Oportunidad, an NGO That Provides Medical Support to Vulnerable Residents in Poor Caracas Neighbourhoods.," *Www.Thehumanitarian.Org*, last modified 2022, <https://www.thehumanitarian.org/news-feature/2022/07/13/Venezuela-COVID-fallout-leaves-children-dying-and-the-poor-scavenging-for-food>.

merupakan bentuk kekurangan energi dan protein yang menyebabkan tubuh menjadi sangat kurus yang membuat mereka membutuhkan bantuan untuk mencukupi nutrisinya.

**Gambar 2. 2 Antrian Distribusi Makanan di Delta Amacuro, Venezuela<sup>50</sup>**



Sumber: NRC/Ingebjørg Kårstad (UN News)

Gambar diatas merupakan salah satu kondisi krisis pangan di Venezuela. Banyak dari masyarakat Venezuela mengantri untuk mendapatkan distribusi makanan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Antrian panjang tersebut menunjukkan banyaknya penduduk yang membutuhkan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Disisi lain, Antrian panjang tersebut

---

<sup>50</sup> Ingebjørg Kårstad, “Food Distribution in Venezuela,” *News.Un.Org*, <https://news.un.org/en/story/2020/02/1058051>.

menjadi representasi nyata dari tekanan yang dirasakan oleh masyarakat Venezuela dalam mengatasi krisis pangan yang berkelanjutan.

Distribusi makanan yang dilakukan oleh PBB menjadi sebuah bentuk respons atas krisis kemanusiaan yang semakin meluas di Venezuela. Faktor-faktor seperti krisis ekonomi, dampak pandemi Covid-19 dan ketidakstabilan politik telah membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Sulitnya akses terhadap pangan yang diperparah dengan kondisi sosial serta ekonomi yang sulit menunjukkan tingkat kesulitan masyarakat Venezuela yang cukup tinggi dan menjadi tantangan yang sulit bagi mereka.

Krisis pangan di Venezuela telah berlangsung sejak lama. Beberapa faktor yang mendasari krisis pangan di Venezuela, termasuk kondisi politik internal dalam negeri, kebijakan ekonomi yang tidak tepat, tekanan dari luar negeri hingga ambisi rezim Bolivarian. Pada tahun 1998, Hugo Chavez terpilih sebagai presiden Venezuela.<sup>51</sup> Setelah terpilih, Hugo Chavez menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rezim Puntofijista yaitu rezim neoliberal sebelumnya. Sistem dari Puntofijista dikritik Hugo Chavez sebagai sebuah sistem yang oligopolistik yaitu sebuah sistem yang hanya menguntungkan kaum elit. Terpilihnya Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela memberikan harapan baru bagi masyarakat Venezuela. Hugo Chavez mengusulkan sebuah revolusi yang disebut dengan *Bolivarian Revolution* (Revolusi Bolivarian), yang terinspirasi dari semangat perlawanan pemimpin Venezuela Simon Bolivar terhadap bangsa Spanyol pada Abad ke-19.

---

<sup>51</sup> Nuryanti and Salsabila, "Strategi Kebijakan Pemerintah Venezuela Di Tengah Krisis." <<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7625>>

Dalam hal ini, rezim Bolivarian memperjuangkan pembangunan sosial, kesetaraan dan kondisi sosial. Rezim Hugo Chavez tersebut melakukan program sosial berskala besar yang didanai oleh kekayaan alam negara tersebut, yaitu minyak.

Setelah Hugo Chavez digantikan oleh Nicolas Maduro pada tahun 2013. Nicolas Maduro melanjutkan rezim Bolivarian serta melanjutkan kebijakan-kebijakan sosial dan ekonomi yang secara langsung didanai oleh minyak tersebut. Hal ini yang kemudian menjadikan Venezuela sebagai negara yang berketergantungan terhadap minyak. Ketergantungan terhadap minyak tersebut juga tercermin dalam pasal 303 Konstitusi Republik Bolivarian yang menyatakan bahwa:<sup>52</sup>

*TITLE VI ARTICLE 303: Socio Economic System*

*“For reasons of economic, political sovereignty and national strategy, the State will retain all the shares of Petróleos de Venezuela, S.A., or the entity created for the management of the oil industry, except those of the subsidiaries, strategic associations, companies and any other that has been established or will be established as a consequence of the business development of Petróleos de Venezuela, S.A.”*

---

<sup>52</sup> “Constitution - Title VI: Socioeconomic System (Art. 299-321) - Venezuelanalysis,” accessed September 18, 2024, <https://venezuelanalysis.com/constitution-title-6/>.

Konstitusi menetapkan bahwa negara mempertahankan kepemilikan penuh atas perusahaan minyak negara *Patroleos de Venezuela, S.A (PDVSA)*. Pasal tersebut menunjukkan kontrol pemerintah atas industri minyak, yang merupakan sumber pendapatan utama Venezuela. Disisi lain, sumber daya minyak merupakan aset yang paling berpengaruh dan penting bagi pemerintahan Hugo Chavez dan Maduro karena, minyak berfungsi untuk mendukung program-program domestik serta menyediakan devisa bagi negara untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu program yang penting adalah *Misiones* yaitu sebuah program untuk menyelamatkan penduduk. *Misiones* mencakup lebih dari 30 program sosial seperti subsidi pendidikan, subsidi perumahan, dan subsidi pangan. Pendanaan program *Misiones* tersebut berasal dari dana khusus yang dikelola oleh presiden dan kabinetnya yang menerima pendapatan minyak secara langsung oleh PDVSA.

Pada awal masa kepresidenan Nicolas Maduro, dari tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2014 ekonomi Venezuela terus tumbuh karena harga minyak dunia yang stabil melebihi \$100 per barel. Namun, pada tahun 2014 situasinya berubah secara signifikan dimana harga minyak tiba-tiba jatuh di bawah \$30 per barel. Hal ini menyebabkan Venezuela dilanda krisis ekonomi karena sektor minyak merupakan sumber pendapatan utama bagi *Gross Domestic Product (GDP)* negara tersebut. Investasi yang seharusnya dapat dialokasikan ke sektor lain dialihfungsikan khusus untuk sektor minyak saja. Sehingga, pendapatan Venezuela didominasi oleh minyak. Meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia namun, ketergantungannya pada minyak membuatnya rentan terhadap

fluktuasi harga atau yang dikenal sebagai *boom-bust*.<sup>53</sup> Jatuhnya harga minyak dunia menyebabkan penurunan di berbagai sektor seperti devisa, inflasi yang tinggi, penurunan *Gross Domestic Product* (GDP), devaluasi mata uang lokal hingga kelangkaan bahan pokok dan berujung pada krisis pangan di negara tersebut.

Pada tahun 2016, Nicolas Maduro memperkuat sistem distribusi pangan yang didorong oleh motif politik yang dikenal sebagai *Local Committees for Supply and Production* (CLAP).<sup>54</sup> Distribusi pangan melalui CLAP tersebut merupakan respons strategis dan mendesak terhadap peningkatan kelangkaan pangan di Venezuela. Tingkat kemiskinan pada negara tersebut meningkat secara drastis pada tahun 2018 dimana dari tahun 1998 meningkat hampir 90% pada tahun 2018.

Rezim Maduro terus menerapkan kebijakan yang sangat ideologis yang melemahkan produksi pertanian sehingga mengakibatkan konsekuensi yang dikenal sebagai *Dutch Disease* yaitu produksi minyak mendominasi sektor-sektor lainnya yang menyebabkan ketergantungan berlebihan pada impor yang lebih murah daripada produk dalam negeri.<sup>55</sup> Selain itu, pemerintah menerapkan kontrol harga yang ketat. Hal ini merugikan produsen serta menyebabkan kelangkaan ekstrim. Rezim Maduro tidak mampu mengendalikan inflasi yang telah menghancurkan perekonomian Venezuela. Akibatnya, banyak warga miskin Venezuela bergantung pada pengiriman CLAP untuk memenuhi kebutuhan pangan

---

<sup>53</sup> “Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate | Council on Foreign Relations,” accessed September 18, 2024, <https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis>.

<sup>54</sup> Moises Rendon and Jacob Mendales, “The Maduro Diet: Food v. Freedom in Venezuela,” 2018. <https://www.csis.org/analysis/maduro-diet-food-v-freedom-venezuela>

<sup>55</sup> “Venezuela’s Dutch Disease Syndrome | The Daily Star,” accessed September 18, 2024, <https://www.thedailystar.net/opinion/bystander/news/venezuelas-dutch-disease-syndrome-1718860>.

mereka. CLAP sendiri merupakan bantuan bahan pokok yang berasal dari pemerintah. Namun, sebagian besar dari CLAP merupakan barang impor terutama tepung, beras, minyak dan gula. Hampir setengah dari populasi Venezuela mengatakan bahwa CLAP telah menjadi bagian penting dari pola makan mereka.

Keterkaitan antara makanan dan politik semakin diperkuat melalui penggunaan *Carnet de la Patria* yaitu kartu identifikasi yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah seperti CLAP, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan subsidi pemerintah.<sup>56</sup> Kartu ini digunakan untuk memungkinkan rezim Maduro memberikan lebih banyak dukungan kepada para pendukungnya dan juga kartu ini digunakan rezim Maduro untuk memperkuat serta mengkonsolidasikan kekuasaan politiknya.

Krisis ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga minyak telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang memburuk di Venezuela. Krisis kemanusiaan yang semakin memburuk memberikan kesempatan bagi rezim Nicolas Maduro untuk memperkuat kontrol politiknya dengan mengeksploitasi kesulitan yang dialami oleh penduduk.<sup>57</sup> Salah satu strategi yang digunakan adalah gangguan terhadap program pangan, yang secara efektif digunakan sebagai alat politik untuk mengendalikan populasi Venezuela dalam memperkuat pendukungnya. Dengan adanya kelesuan ekonomi dan penurunan *Gross Domestic Product* sebesar 45% selama empat tahun terakhir menjadikan Venezuela semakin

---

<sup>56</sup> "In the Carnet de La Patria We Trust | Caracas Chronicles," accessed September 18, 2024, <https://www.caracaschronicles.com/2017/02/02/60203/>.

<sup>57</sup> Nindyawati, *Dampak Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Human Security Di Venezuela Periode 2017-2019*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63205>

rentan.<sup>58</sup> Meskipun menghadapi krisis kemanusiaan yang belum terjadi sebelumnya, rezim Maduro menolak bantuan internasional dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak etis yang hanya memperburuk situasi ekonomi

Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, Amerika Serikat telah menerapkan berbagai sanksi ekonomi sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Maduro. Hingga tahun 2019 terdapat 6 perintah eksekutif yang telah dikeluarkan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela.<sup>59</sup>

**1. Executive Order 13692**

Dikeluarkan pada 8 Maret 2015 yang menetapkan pembekuan aset dan pembatasan Visa terhadap 58 pejabat Venezuela.

**2. Executive Order 13808**

Dikeluarkan pada 24 Agustus 2017 yang menetapkan pembatasan akses PDVSA (*Patroleos de Venezuela, S.A.*) terhadap mekanisme keuangan Amerika Serikat.

**3. Executive Order 13827**

Dikeluarkan pada 19 Maret 2018 yang menetapkan larangan transaksi mata uang digital Venezuela oleh warga Amerika Serikat.

**4. Executive Order 13835**

---

<sup>58</sup> “Venezuela Economy: GDP, Inflation, CPI & Interest Rates - FocusEconomics,” accessed September 18, 2024, <https://www.focus-economics.com/countries/venezuela/>.

<sup>59</sup> Meinita Triandini and Arie Kusuma Paksi, “Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 12, no. 3 (2023): 364–374. < <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2672>>

Dikeluarkan pada 21 Mei 2018 yang menetapkan penghentian pembelian mata uang Venezuela oleh warga Amerika Serikat.

**5. Executive Order 13850**

Dikeluarkan pada 1 November 2018 yang menetapkan penahanan properti dan melarang transaksi seperti transfer, ekspor, pembayaran dan lainnya ke Venezuela oleh warga Amerika Serikat.

**6. Executive Order 13884**

Dikeluarkan pada 5 Agustus 2019 yang menetapkan pemblokiran properti yaitu segala jenis aset atau kepentingan dalam aset yang dimiliki maupun dikendalikan oleh Pemerintah Venezuela yang berada di Amerika Serikat. Hal ini termasuk properti milik negara, rekening bank, investasi, kendaraan, *real estate*, aset finansial.

Dampak dari sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela sangat signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap turunnya pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP), cadangan devisa yang menipis, lambatnya arus perdagangan, nilai tukar mata uang yang melemah serta turunnya industri minyak Venezuela.<sup>60</sup> Hal tersebut mengakibatkan krisis ekonomi yang semakin parah. Sanksi tersebut, memfokuskan pada sumber utama pendapatan negara yaitu minyak dengan menghentikan akses keuangan dan transaksi ke Venezuela sehingga membuat perekonomian Venezuela bergantung pada bantuan dan pinjaman luar negeri. Dengan perekonomian yang lesu tersebut, pemerintah

---

<sup>60</sup> “How Sanctions Contributed to Venezuela’s Economic Collapse,” accessed September 18, 2024, <https://korbel.du.edu/regional-studies/news-events/all-articles/how-sanctions-contributed-venezuelas-economic-collapse>.

Venezuela cenderung menolak bantuan kemanusiaan yang ditawarkan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Pemerintah Venezuela menganggap bantuan tersebut merupakan campur politik asing yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Maduro. Penolakan pemerintah Venezuela terhadap bantuan kemanusiaan memperburuk situasi krisis kemanusiaan yang ada di negara tersebut. Dalam kondisi ekonomi yang lesu dan kurangnya pasokan makanan serta obat-obatan yang memadai bagi warga Venezuela. Penolakan tersebut semakin memperpanjang penderitaan masyarakat Venezuela. Situasi ekonomi yang buruk, ketidakstabilan politik yang terus berlanjut serta ketidakpastian atas ketersediaan pangan membuat krisis pangan di Venezuela tak kunjung usai.

## **2.2 Pengaruh Covid-19 Terhadap Kondisi Krisis Pangan di Venezuela**

Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah menghadapi tantangan yang sulit dimana ekonomi Venezuela tersebut runtuh yang mengakibatkan warga Venezuela harus hidup dalam garis kemiskinan. Hal tersebut menyebabkan banyaknya warga Venezuela yang tidak memiliki ketahanan pangan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat khususnya anak-anak menderita kekurangan gizi. Pada tahun 2021 *World Food Programme* (WFP) menerbitkan sebuah laporan yang menemukan bahwa Venezuela mengalami krisis pangan terburuk keempat di dunia sebanding dengan negara-negara terdampak perang seperti Afghanistan dan Yaman.<sup>61</sup> Dalam laporan tersebut *World Food Programme* menemukan bahwa sebanyak 9.3 juta orang tidak memiliki ketahanan pangan yang

---

<sup>61</sup> World Food Programme, "Executive Board WFP Management Plan ( 2021 – 2023 ) Executive Summary," no. November 2020 (2021): 16–20.

aman dan bergizi untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Keadaan tersebut diperparah dengan kebijakan Presiden Maduro dimana beliau mencetak lebih banyak uang yang mengakibatkan hiperinflasi sehingga harga kebutuhan pokok naik secara signifikan dari waktu ke waktu. Dalam laporan tersebut, masyarakat Venezuela menyatakan bahwa mereka hanya mampu membeli 20% makanan yang mereka mampu beli. Selain itu, hal ini diperburuk dengan Presiden Maduro yang memblokir sebagian besar upaya bantuan asing dan bantuan dari LSM yang hanya memperburuk kondisi krisis pangan yang terjadi di negara tersebut. Keadaan pra-pandemi yang cukup sulit tersebut semakin memperparah kondisi Venezuela dimana pada tahun 2019 Covid-19 muncul dan mulai menyebar di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 semakin memperburuk kondisi yang sudah rapuh di Venezuela, menambah beban pada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Setelah kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada 13 Maret 2020 situasi kesehatan di Venezuela semakin diperburuk dengan lebih dari 62.000 kasus yang terkonfirmasi dan sekitar 500 orang telah meninggal dunia. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan jumlah pasti dimana Venezuela memiliki keterbatasan dalam melakukan pengujian.<sup>62</sup> Pasca diumumkankannya pandemi Covid-19, pemerintah Venezuela melakukan karantina wilayah penuh, menutup bisnis, menghentikan perjalanan serta menutup perbatasan.<sup>63</sup> Karantina yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap

---

<sup>62</sup> Moises Rendon and Lucan Sanchez, "Covid-19 in Venezuela: How the Pandemic Deepened a Humanitarian Crisis," 2020. <https://www.csis.org/analysis/covid-19-venezuela-how-pandemic-deepened-humanitarian-crisis>

<sup>63</sup> Oriana Van Praag and Cynthia J. Arnson, "A Crisis Within a Crisis: Venezuela and COVID-19" (2020): 1–26. <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/crisis-within-crisis-venezuela-and-covid-19>

masyarakat Venezuela dimana banyak warga Venezuela yang terpaksa kehilangan pekerjaan mereka. Dengan kondisi tersebut, masyarakat Venezuela tidak lagi memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli makanan bagi keluarga mereka. Hal ini ditandai dengan 75% populasi yang ada di ibu kota Venezuela tidak cukup memenuhi kebutuhan makan mereka dan sebanyak 82.3% seluruh masyarakat di Venezuela tidak mampu untuk membeli cukup makanan dan memberi makan bagi keluarga mereka.

Pandemi Covid-19 yang muncul secara tiba-tiba menyebabkan sistem perawatan kesehatan Venezuela sangat tidak siap untuk menghadapi pandemi Covid-19. *Human Rights Watch* dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Kemanusiaan Universitas Johns Hopkins menyoroti pentingnya bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Venezuela. Sistem kesehatan Venezuela telah runtuh, dengan kekurangan obat-obatan, gangguan pada utilitas dasar dan emigrasi pekerja kesehatan menempatkan Venezuela masuk ke dalam peringkat 180 dari 195 negara dalam Indeks Keamanan Kesehatan Global pada tahun 2019.<sup>64</sup> Venezuela masuk ke dalam negara yang paling tidak siap untuk mengatasi pandemi. Sekretaris Jenderal PBB dan Koordinator Bantuan Darurat beserta Lima Group yaitu Amerika Serikat, dan Uni Eropa menekan Pemerintah Nicolas Maduro untuk membuka akses bagi respons kemanusiaan penuh dari PBB dimana Nicolas Maduro masih tetap tidak memberikan ruang bagi bantuan-bantuan luar negeri yang masuk untuk membantu masyarakat Venezuela terdampak krisis

---

<sup>64</sup> Vasilii Erokhin and Tianming Gao, "Impacts of COVID-19 on Trade and Economic Aspects of Food Security: Evidence from 45 Developing Countries," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 16 (2020): 1–28. < <https://doi.org/10.3390/ijerph17165775>>

pangan dan kesehatan.<sup>65</sup> Upaya penekanan pemerintah Venezuela pun membuahkan hasil ketika pada April 2021, *World Food Programme* (WFP) dan pemerintah Venezuela menandatangani nota kesepahaman yang memvalidasi operasi WFP di Venezuela. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut membuka kesempatan bagi *World Food Programme* dalam memulai program bantuannya di Venezuela setelah sebelumnya pemerintah Venezuela menolak segala bentuk bantuan luar negeri guna menuntaskan permasalahan di negara nya. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut WFP kini memiliki legitimasi dalam melaksanakan program bantuan pangan di Venezuela.

### **2.3 Profil World Food Programme**

Dalam hubungan internasional, entitas organisasi internasional merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dimana organisasi internasional membantu serta menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh sebuah kelompok maupun negara.<sup>66</sup> Dalam hal ini *World Food Programme* (WFP) merupakan sebuah lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) yang menangani permasalahan pangan serta menjadi wadah pertama dalam menyelesaikan permasalahan pangan di dunia.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Marianella Herrera-Cuenca et al., “Exploring Food Security/Insecurity Determinants within Venezuela’s Complex Humanitarian Emergency,” *Dialogues in Health* 1 (December 1, 2022): 100084. <<https://doi.org/10.1016/j.dialog.2022.100084>>

<sup>66</sup> “History | World Food Programme,” accessed September 18, 2024, <https://www.wfp.org/history>.

<sup>67</sup> Ibid.

*World Food Programme* merupakan sebuah organisasi internasional yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi ini berperan sebagai badan bantuan pangan terbesar di dunia yang khusus menangani masalah kelaparan global. WFP sendiri didirikan pada tahun 1961 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 1714 (XVI) dimana WFP memiliki status hukum sebagai badan otonom dalam sistem PBB. Hal ini berarti meskipun WFP merupakan bagian dari PBB namun, organisasi ini memiliki mandat, struktur tata kelola serta otonomi operasional sendiri yang memungkinkan WFP untuk beroperasi secara independen dalam mencapai tujuannya yaitu menciptakan dunia tanpa kelaparan (*Zero Hunger*). Status otonomi *World Food Programme* sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB tercermin dalam 2 aspek yaitu finansial serta fleksibilitas dan responsivitas. Dimana WFP tidak bergantung pada alokasi dana dari PBB namun, organisasi ini mengandalkan sumbangan dari negara, lembaga kemanusiaan, sektor swasta maupun individu. Status otonom WFP juga memungkinkan organisasi ini untuk merespons dengan cepat terhadap krisis pangan global. Organisasi ini memiliki wewenang dalam membuat keputusan program dan operasional sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan mengembangkan strategi yang disesuaikan dalam menghadapi tantangan keamanan pangan yang dinamis di tingkat global. Sebagai organisasi internasional, WFP memiliki struktur dan tata kelola yang jelas dimana *World Food Programme* sendiri memiliki kantor pusat di Roma, Italy dan dipimpin oleh seorang direktur eksekutif yang saat ini dijabat oleh Cindy McCain yang diangkat pada Maret 2023.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> World Food Programme, "WFP Organigram," no. September (2020): 2020.

Pengangkatan direktur eksekutif dilakukan bersama oleh Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal FAO. Direktur eksekutif tersebut bertanggung jawab atas administrasi WFP, implementasi program-program WFP serta mewakili organisasi *World Food Programme* dalam forum-forum internasional. Dalam hal ini, WFP juga memiliki dewan eksekutif yang terdiri dari 36 negara anggota yaitu: Aljazair, Chad, Etiopia, Ghana, Kenya, Maroko, Senegal, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh, Tiongkok, India, Iran, Kuwait, Republik Korea, Arab Saudi, Argentina, Brasil, Republik Dominika, Panama, Peru, Australia, Kanada, Finlandia, Jerman, Irlandia, Jepang, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Britania Raya, Amerika Serikat, Hongaria, Polandia, Federasi Rusia. Separuh anggota dewan dipilih oleh ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) serta separuh nya lagi dipilih oleh dewan FAO hal ini memastikan keterwakilan dari wilayah PBB.<sup>69</sup> Disisi lain, *World Food Programme* juga memiliki wakil direktur eksekutif yang bertugas untuk membantu dalam pengelolaan operasi serta inisiatif strategis dimana WFP beroperasi melalui 6 biro regional yang mengkoordinasikan aktivitas di area geografis tertentu meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan operasional di tingkat lokal. 6 biro ini terletak di Bangkok, Kairo, Dakar, Johannesburg, Nairobi, dan Panama. Selain itu, WFP memiliki hampir 80 kantor di negara yang mengimplementasi program sesuai kebutuhan lokal, memantau, melaksanakan proyek serta memberikan bantuan darurat. Adapun sekretariat WFP yang terdiri dari berbagai divisi seperti divisi manajemen proyek, divisi manajemen sumber daya, dan divisi

---

<sup>69</sup> WORLD FOOD PROGRAMME, "Executive Board Members for 2024 and Terms of Tenure for 2024–2026 Member States Elected by ECOSOC or the FAO Council" 2026, no. June 2024 (2024): 2026.

hubungan eksternal atau layanan umum. Per tahun 2023, WFP mempekerjakan lebih dari 22.300 staf dengan sekitar 88% direkrut secara lokal di negara-negara tempat *World Food Programme* beroperasi. Hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman serta responsivitas yang lebih baik terhadap konteks lokal.

*World Food Programme* memiliki prioritas utama yaitu *Zero Hunger* (tanpa kelaparan) guna menciptakan dunia tanpa kelaparan serta mencapai ketahanan pangan yang tertuang dalam tujuan ke 2 di *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>70</sup> *World Food Programme* dengan mitranya terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan dunia tanpa kelaparan dengan terus memberikan bantuan pangan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. WFP meyakini bahwa pencapaian *zero hunger* memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut visi WFP, terdapat 5 langkah utama dalam mengatasi kelaparan yaitu:<sup>71</sup>

- 1. *Put the Furthest Behind First***

Langkah pertama yaitu memberikan fokus pada orang-orang yang paling rentan terlebih dahulu yaitu orang-orang yang paling miskin dan terbelakang harus menjadi prioritas. Untuk memaksimalkan potensinya, perlindungan sosial harus diperkuat bagi kelompok yang paling rentan.

- 2. *Pave the Road from Farm to Market***

---

<sup>70</sup> “History | World Food Programme.”

<sup>71</sup> “Five Steps to Zero Hunger. These Five Steps Constitute The... | by World Food Programme | World Food Programme Insight | Medium,” accessed September 18, 2024, <https://medium.com/world-food-programme-insight/five-steps-to-zero-hunger-e7975823a87c>.

Langkah kedua yaitu membuka akses pasar bagi produk pertanian. Masyarakat pedesaan sering hanya memiliki akses ke pertanian tanpa jaminan pasar. Investasi dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pasar yang meliputi infrastruktur seperti jalan, penyimpanan, dan listrik serta meningkatkan kemampuan petani dalam memperluas konsumen.

### **3. *Reduce Food Waste***

Mengurangi pemborosan makanan merupakan sebuah langkah yang penting dimana sekitar sepertiga dari 4 miliar metrik ton makanan yang dihasilkan setiap tahunnya terbuang. Hal tersebut menimbulkan kerugian ekonomi global hingga hampir 750 miliar dolar per tahun. Di negara maju, makanan sering terbuang sedangkan, di negara berkembang makanan disimpan dengan buruk dan memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

### **4. *Encourage a Sustainable Variety of Crops***

Mendorong penggunaan berbagai jenis tanaman dalam menghadapi perubahan iklim serta permasalahan ketersediaan pangan. Saat ini, empat jenis tanaman utama yaitu beras, gandum, jagung dan kedelai mewakili 60% kalori yang dikonsumsi. Petani perlu didorong dalam melakukan eksplorasi tanaman lain yang lebih beragam serta berkelanjutan, dengan akses pada alat, keterampilan serta pendidikan tentang gizi

### **5. *Make Nutrition a Priority, Starting with a Child's First 1000 Days***

Memprioritaskan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Hal ini merupakan langkah yang penting dalam mendukung pertumbuhan serta

perkembangan yang sehat. Fokus pada nutrisi yang baik selama periode ini dapat mencegah permasalahan seperti stunting dan memastikan bahwa ibu menyusui dan anak-anak mendapatkan gizi yang memadai.

*World Food Programme* memiliki langkah-langkah sistematis dalam mengatasi krisis pangan untuk mencapai tujuan didirikannya.<sup>72</sup> Langkah-langkah atau tahapan-tahapan umum yang dilakukan oleh *World Food Programme* tersebut dibagi menjadi enam fase yaitu:

1. Identifikasi dan Penilaian Awal

*World Food Programme* memulai dengan mengumpulkan data awal guna memahami seberapa parah tingkat krisis yang sedang terjadi.

2. Perencanaan dan Koordinasi

Berdasarkan hasil temuan pada identifikasi awal, *World Food Programme* merencanakan intervensi yang sesuai. Dalam hal ini menentukan jenis bantuan seperti makanan, lokasi distribusi serta jangka waktu yang ditetapkan. Disisi lain, *World Food Programme* juga melakukan koordinasi dengan pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah, dan aktor kemanusiaan lainnya guna memastikan koordinasi yang efektif dan menghindari duplikasi upaya.

3. Mobilisasi Sumber Daya

*World Food Programme* melakukan penggalangan dana dari negara donor dan sumber lainnya untuk mendukung operasi yang akan

---

<sup>72</sup> World Food Programme, “Annual Performance Report,” no. June (2022): 10–14.

dilaksanakan. Ini termasuk kampanye penggalangan dana dan proposal untuk mendapatkan dukungan finansial dari pendonor. Dan *World Food Programme* mengatur logistik baik pengadaan, penyimpanan hingga distribusi bantuan pangan. Hal tersebut mencakup pengaturan rantai pasokan, transportasi serta manajemen gudang.

#### 4. Pelaksanaan Operasi

*World Food Programme* melakukan distribusi makanan atau bantuan pangan kepada populasi yang telah menjadi target distribusi. Pendistribusian tersebut bisa dilakukan melalui distribusi langsung di lapangan maupun mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan yang ada di WFP seperti penggunaan *Field Level Agreement*. Dan dalam pelaksanaannya *World Food Programme* melakukan *monitoring* dan *evaluation* (monev) guna memantau serta memastikan bahwa bantuan mencapai target bantuan secara efektif dan efisien.

#### 5. Penyesuaian dan Respons

Berdasarkan pelaksanaan operasi yang telah berlangsung *World Food Programme* mungkin perlu menyesuaikan program-program mereka. Dalam hal ini, perubahan program dapat berupa perubahan jenis bantuan, penyesuaian lokasi distribusi, penyesuaian waktu distribusi dan lain-lain. Dan menyusun laporan terkait hasil program dan dampaknya. Evaluasi akhir dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan serta memberikan rekomendasi untuk masa depan.

#### 6. Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Setelah fase darurat, *World Food Programme* bekerja sama dengan mitra atau negara terkait untuk merencanakan serta melaksanakan langkah-langkah pemulihan jangka panjang. Hal ini termasuk dukungan untuk pembangunan kapasitas lokal, perbaikan sistem pangan, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap krisis di masa depan. Dalam hal ini *World Food Programme* juga bekerja sama dengan pemerintah maupun aktor lain dalam mengembangkan kebijakan maupun strategi yang mendukung ketahanan pangan dan mengurangi risiko krisis di masa depan.

Dalam menjalankan programnya *World Food Programme* didanai melalui bantuan dari *Governments* (Negara), *Individuals* (Individu), dan *Corporations* (Perusahaan). Dana yang berasal dari negara adalah sumber utama dana bagi *World Food Programme* dimana lebih dari 60 negara yang berkontribusi dalam program-program kemanusiaan serta pembangunan dunia.<sup>73</sup> Dalam hal ini, dana dari negara-negara donor biasanya berupa uang tunai yang diberikan secara langsung kepada *World Food Programme* dalam melaksanakan programnya di negara maupun kelompok terdampak. Sedangkan, dana yang berasal dari perusahaan biasanya berupa produk, uang dan layanan. Disisi lain, biasanya perusahaan melibatkan karyawan maupun pelanggan mereka dalam membantu melaksanakan program-program yang dirancang oleh *World Food Programme*. Dana yang masuk ke *World Food Programme* secara terbuka dapat diakses melalui website resmi milik *World*

---

<sup>73</sup> Ibid.

*Food Programme* sehingga membuat organisasi *World Food Programme* menjadi terbuka dan transparan.

Sebagai organisasi pangan terbesar di dunia *World Food Programme* telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek penanggulangan kelaparan serta malnutrisi di seluruh dunia. Dalam hal bantuan pangan darurat, WFP menyediakan makanan serta dukungan logistik kepada komunitas yang terkena dampak bencana alam, konflik maupun krisis lain dengan memberikan kepada lebih dari 100 juta orang yang tersebar di 82 negara pada tahun 2020.<sup>74</sup> Selain itu, WFP menjalankan program bantuan pangan berkelanjutan seperti program makanan sekolah (*School Meal*) yang menawarkan makanan bergizi bagi anak-anak, menyediakan uang tunai atau voucher bagi keluarga untuk membeli makanan. WFP juga fokus pada ketahanan pangan dan nutrisi dengan mendukung proyek atau program yang memperbaiki infrastruktur pertanian dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan serta menyediakan makanan-makanan khusus untuk ibu hamil, menyusui, bayi dan balita guna mengatasi malnutrisi. Dalam hal pengurangan pemborosan makanan WFP berusaha mengurangi sisa makanan dengan memperbaiki sistem penyimpanan dan distribusi serta mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan makanan yang lebih baik. WFP juga berinvestasi dalam pemberdayaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan untuk petani dan masyarakat mengenai teknik pertanian yang baik dan pengelolaan pangan. WFP juga bekerja sama dengan pemerintah, lsm dan sektor swasta dalam memperluas dampak program mereka. Terakhir, WFP melakukan penelitian serta advokasi

---

<sup>74</sup> Ibid.

dengan mengumpulkan dan menganalisa data tentang kelaparan dan malnutrisi guna merancang intervensi yang lebih efektif serta mendukung kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan global.

*World Food Programme* di Venezuela pertama kali hadir di Venezuela ketika WFP diundang oleh pemerintah Venezuela untuk melakukan *Food Security Assessment (FSA)* pada Februari 2020.<sup>75</sup> Penilaian tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan di Venezuela serta melakukan identifikasi populasi yang paling rentan. Dalam melakukan FSA, *World Food Programme* diberi wewenang penuh untuk merancang, dan melaksanakan evaluasi tersebut secara independen dan diberikan akses penuh ke wilayah-wilayah di seluruh negeri. FSA dilakukan melalui metode standar *Emergency Food Security Assessment (EFSA)* dengan menggunakan pendekatan *Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security (CARI)* yang dikumpulkan dari 8.375 rumah tangga di 23 negara bagian di Venezuela.<sup>76</sup> CARI sendiri yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan berbagai indikator yang relevan dengan ketahanan pangan yang berguna untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keamanan pangan dan kebutuhan bantuan di suatu wilayah.<sup>77</sup> CARI menggunakan indikator penting yaitu

---

<sup>75</sup> “Venezuela Food Security Assessment | World Food Programme.” <World Food Programme, “WFP Venezuela Food Security Assessment Main Findings.”>

<sup>76</sup> “Venezuela Food Security Assessment | World Food Programme.”

<sup>77</sup> UN WFP, “Third Edition Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food Security (CARI) TECHNICAL GUIDANCE FOR WFP’S CONSOLIDATED APPROACH FOR REPORTING INDICATORS OF FOOD SECURITY (CARI) United Nations World Food Programme,” no. December (2021). <https://www.wfp.org/publications/consolidated-approach-reporting-indicators-food-security-cari-guidelines>

### 1. *Food Consumption Score (FCS)*

Merupakan indikator yang digunakan dalam menilai kualitas dan keragaman diet atau keragaman jenis makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indikator tersebut menghitung seberapa sering rumah tangga mengonsumsi berbagai jenis makanan selama 1 minggu terakhir seperti, karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah-buahan maupun produk susu. FCS dihitung berdasarkan frekuensi konsumsi yaitu seberapa sering jenis makanan tertentu dikonsumsi oleh masyarakat Venezuela, kelompok makanan yaitu jenis makanan yang dikategorikan seperti sumber karbohidrat, protein dan sayuran serta bobot gizi yaitu setiap kelompok makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Venezuela menggambarkan kontribusi gizinya. Dengan FCS yang dilakukan akan menghasilkan kelompok-kelompok atau skor yaitu skor baik dimana rumah tangga memiliki pola makan beragam dan memadai, skor borderline dimana rumah tangga memiliki pola makan yang kurang beragam dan, skor buruk dimana rumah tangga mengalami kekurangan gizi karena makanan yang rendah dan tidak bervariasi.

### 2. *Food Energy Shortfall*

*Food Energy Shortfall* adalah indikator yang mengukur tingkat defisit energi dalam asupan makanan di suatu rumah tangga. Indikator ini menilai apakah rumah tangga mengonsumsi cukup kalori dalam memenuhi kebutuhan dasar energinya. Apabila konsumsi energi rendah, maka rumah tangga dianggap mengalami kekurangan energi pangan. Indikator ini

berguna untuk memahami serta menggambarkan tingkat kekurangan energi pangan yang dapat mengakibatkan kekurangan gizi, penurunan berat badan serta kelemahan fisik.

### 3. *Economic Vulnerability Indicator*

*Economic Vulnerability Indicator* merupakan indikator yang mengukur kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama pangan. Indikator ini melihat seberapa besar pendapatan rumah tangga yang dihabiskan untuk makanan. Apabila rumah tangga menghabiskan sebagian besar pendapatannya hanya untuk makanan maka hal tersebut menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Keluarga yang masuk ke dalam kategori tingkat kerentanan ekonomi tinggi tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, dan pendidikan. Maka dari itu, semakin keluarga tersebut menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk makanan maka rumah tangga tersebut sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan dan penurunan pendapatan.

### 4. *Asset Depletion Indicator*

Merupakan sebuah indikator yang mengukur sejauh mana rumah tangga menjual aset atau mengorbankan aset produktif mereka guna memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan dasar lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sedang mengalami kesulitan dan mungkin tidak dapat pulih dengan cepat dari krisis.

Dengan penilaian yang telah dilakukan WFP tersebut mengungkapkan bahwa 2.3 juta orang berada dalam ketidakamanan pangan akut sementara itu, lebih dari 7 juta orang mengalami ketidakamanan pangan dan mengungkapkan bahwa 32.3% populasi Venezuela mengalami ketidakamanan pangan dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Hal ini yang membuat Venezuela masuk ke dalam *Emergency Countries* pada tahun 2020-2022. Disisi lain, penilaian yang dilakukan oleh WFP mengemukakan daerah-daerah yang memiliki tingkat ketidakamanan pangan tinggi seperti Delta Amacuro (21%), Amazonas (15%) Falcon (13%), Zulia (11%) dan Bolivar (11%). Serta, dalam penilaiannya WFP menemukan bahwa tingginya harga pangan membuat akses warga menjadi semakin sulit sehingga memperparah ketidakamanan pangan di banyak wilayah yang mengakibatkan banyak warga Venezuela yang mengurangi porsi makan, menjual aset maupun bekerja dengan imbalan makanan.

Peran *World Food Programme* di Venezuela dalam mengatasi krisis pangan sangat penting, khususnya melalui berbagai kerja sama dengan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO) kerjasama yang erat memungkinkan WFP untuk dapat memperluas jangkauan operasinya. Pada tahun 2021, pemerintah Venezuela dan *World Food Programme* menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang menjadi legitimasi dan landasan penting bagi program dan operasi kemanusiaan WFP di Venezuela.<sup>78</sup> Kesepakatan tersebut juga memfasilitasi pendistribusian bantuan di berbagai wilayah Venezuela dan menyatakan bahwa

---

<sup>78</sup> “Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General | Meetings Coverage and Press Releases,” accessed September 18, 2024, <https://press.un.org/en/2021/db210420.doc.htm>.

WFP memimpin kluster logistik dalam memastikan respons yang efektif selama krisis yang sedang terjadi di Venezuela.

Dalam memastikan kelancaran dan efektivitas dalam pendistribusian bantuan, WFP memperkuat kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional melalui *Field Level Agreement* (FLA) yaitu perjanjian yang digunakan dalam kerjasama antara WFP dengan NGO yang digunakan dalam berbagai situasi yang memberikan wewenang bagi NGO untuk mengelola sumber daya WFP serta mengimplementasikan kegiatan atas nama WFP.<sup>79</sup> Dengan adanya kerjasama tersebut maka pendistribusian bantuan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

*World Food Programme* melakukan pengiriman bantuan makanan pertama ke Maracaibo, Venezuela pada Juli 2021 sebagai persiapan dalam meluncurkan program *school meal* yang ditujukan bagi anak-anak dan staf sekolah yang rentan.<sup>80</sup> Pada tahun 2021 Venezuela masih menerapkan *lockdown* di wilayahnya sehingga mengakibatkan sekolah-sekolah ditutup. Dalam mengatasi hal tersebut, WFP mengadaptasi programnya dengan membagikan paket makanan untuk dibawa pulang. Paket tersebut berisi beras, lentil, garam, minyak sayur, dan lain-lain. WFP menargetkan sebanyak 185.000 anak dan staf sekolah yang mendapatkan bantuan. Dalam perkembangannya, WFP tidak hanya memberikan atau membagikan makanan saja namun, WFP juga melakukan pembangunan infrastruktur di sekolah seperti melakukan rehabilitasi kantin dan memberikan pelatihan terhadap staf

---

<sup>79</sup> General Conditions et al., "Field Level Agreement : General Conditions Field Level Agreement General Conditions" 1, no. c (2024). <https://www.wfp.org/field-level-agreement-fla>

<sup>80</sup> Ibid.

sekolah agar dapat menjalankan program makanan dengan standar yang telah ditentukan oleh WFP. Dalam jangka panjang, WFP juga mengelola rantai pasokan dari pembelian hingga distribusi makanan serta memastikan efisiensi dan kelancaran program di tengah tantangan pandemi.

Pada tahun 2022 terdapat banjir di wilayah Venezuela. Banjir tersebut disebabkan oleh musim hujan yang tidak biasa dan diperburuk dengan fenomena *La Nina* serta sejumlah gelombang tropis yang menerpa negara Venezuela.<sup>81</sup> Hujan lebat tersebut telah mempengaruhi berbagai wilayah di Venezuela termasuk negara bagian Trujillo, Merida, Zulia, Tachira dan Distrik Ibu Kota. Pada bulan April 2022, keadaan darurat diumumkan di beberapa negara bagian, dengan banjir yang telah merusak ribuan rumah, lahan pertanian dan infrastruktur yang berdampak bagi 86.000 warga Venezuela dengan kerugian yang besar di bidang pertanian dan mata pencaharian mereka.<sup>82</sup> Hujan lebat yang terus berlanjut sampai bulan November menyebabkan banjir dan tanah longsor tambahan di berbagai wilayah di Venezuela. Pada Oktober 2022 tercatat lebih dari 120 kota di 17 negara bagian terdampak banjir dan tanah longsor yang menyebabkan lebih dari 64.000 orang yang membutuhkan bantuan. Sebagai tanggapan atas keadaan darurat tersebut WFP memobilisasi bantuan dan bekerja sama dengan organisasi lain seperti *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC) untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang sedang dialami oleh warga Venezuela.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Country Strategic Plan, “Latin America Annual Country Report 2022” (2023).

<sup>82</sup> World Food Programme, “Annual Country Report - 2023” (2023).

<sup>83</sup> Plan, “Latin America Annual Country Report 2022.”

Dalam perkembangannya, pada tahun 2023 *World Food Programme* memperluas program-programnya untuk menghadapi tantangan keamanan pangan yang terus berkembang. Dalam konteks ini, *World Food Programme* melakukan pelaporan melalui *Annual Country Report* untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi program-program nya.<sup>84</sup> Sehingga, *World Food Programme* dapat mengetahui situasi aktual yang ada di lapangan dan dapat menyesuaikan respon/kebijakan yang sesuai dengan kondisi aktual yang sedang terjadi. Melalui *Interim Country Strategic Plan 2023-2025 (ICSP)* WFP melanjutkan fokus utama pada bantuan pangan berbasis sekolah, mendukung anak-anak usia dini, siswa dengan disabilitas, staf sekolah, perempuan hamil dan menyusui serta keluarga mereka.<sup>85</sup> Program-program tersebut dirancang untuk memberikan makanan bergizi bagi kelompok-kelompok rentan terutama di daerah yang paling terpengaruh oleh krisis ekonomi dan bencana alam. Selain itu, WFP memperkuat kemitraan dengan lembaga nasional dan organisasi non pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pada sistem pertanian pangan, logistik dan produksi. Sebagai upayanya dalam merespon situasi darurat bencana iklim WFP memperluas dukungannya terhadap masyarakat terdampak dengan meningkatkan langkah-langkah kesiapsiagaan serta pengelolaan risiko. Dengan langkah-langkah tersebut WFP berkomitmen untuk dapat terus menghadapi tantangan serta mendukung pemulihan dan ketahanan masyarakat Venezuela dalam jangka panjang guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>84</sup> Programme, "Annual Performance Report."

<sup>85</sup> World Food Programme, "Bolivarian Republic of Venezuela Interim Country Strategic Plan (2023-2025)," no. March 2023 (2023): 1–29.